

**PENGARUH INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI, BIAYA  
PUBLIK, DAN POLUSI UDARA TERHADAP KETIMPANGAN  
PENDAPATAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Disusun oleh:**

**Nama : Fadhan Hadi**

**Npm : 2310011111014**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan*

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

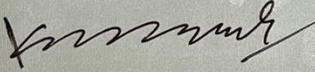
HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI, BIAYA PUBLIK, DAN  
POLUSI UDARA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

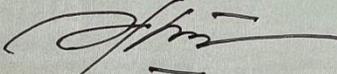
Oleh  
Nama : Fadhan Hadi  
NPM : 2310011111014

Tim Penguji

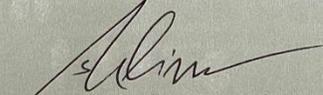
Ketua

  
(Dr. Kasman Karimi, S.E.,M.Si)

Sekretaris

  
(Dr. Alvis Rozani, S.E., M.Si)

Anggota

  
(Dr. Irwan Muslim, S.E.,MP)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Pada tanggal 04 September 2025

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bung Hatta



(Dr. Eri Febrina Harahap, S.E.,M.Si)

**JUDUL SKRIPSI**

**PENGARUH INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI, BIAYA PUBLIK, DAN  
POLUSI UDARA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA**

Oleh

Nama : Fadhan Hadi

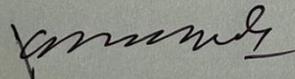
NPM : 2310011111014

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 04 September 2025

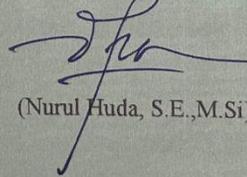
**Menyetujui**

Pembimbing



(Dr. Kasman Karimi, S.E.,M.Si)

Ketua Program Studi



(Nurul Huda, S.E.,M.Si)

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadhan Hadi

NPM : 2310011111014

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Indeks Perilaku Anti Korupsi, Biaya Publik, dan  
Polusi Udara Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Dengan demikian saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 04 September 2025



Fadhan Hadi  
(2310011111014)

# PENGARUH INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI, BIAYA PUBLIK, DAN POLUSI UDARA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Fadhan Hadi<sup>1</sup>, Kasman Karimi<sup>2</sup>

Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta  
[fadhanhadi09@gmail.com](mailto:fadhanhadi09@gmail.com), [kasmankarimi@bunghatta.ac.id](mailto:kasmankarimi@bunghatta.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), Biaya Publik, dan Polusi Udara terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan penting karena dapat menghambat pemerataan hasil pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan yang diukur dengan rasio Gini, sedangkan variabel independen meliputi IPAK, Biaya Publik, dan Polusi Udara. Data yang digunakan adalah data panel 34 provinsi di Indonesia selama periode 2020–2024. Metode analisis yang diterapkan adalah regresi data panel dengan model terbaik *Fixed Effect Model (FEM)*, yang dipilih berdasarkan serangkaian uji kesesuaian model. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik dan uji hipotesis, baik secara parsial maupun simultan, untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti perbaikan perilaku antikorupsi justru diikuti dengan meningkatnya ketimpangan pada wilayah tertentu. Biaya Publik berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga peningkatan belanja pemerintah mampu menekan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, Polusi Udara berpengaruh positif namun tidak signifikan, yang artinya peningkatan polusi cenderung memperlebar ketimpangan meskipun pengaruhnya tidak kuat secara statistik. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan perilaku antikorupsi, alokasi belanja publik yang tepat sasaran, serta kebijakan lingkungan yang berkelanjutan guna mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Ketimpangan Pendapatan, Indeks Perilaku Anti Korupsi, Biaya Publik, Polusi Udara, Data Panel.

# THE IMPACT OF THE ANTI-CORRUPTION BEHAVIOR INDEX, PUBLIC EXPENDITURE, AND AIR POLLUTION ON INCOME INEQUALITY IN INDONESIA

Fadhan Hadi<sup>1</sup>, Kasman Karimi<sup>2</sup>

Development Economics, Faculty of Economics and Business, Bung Hatta University  
[fadhanhadi09@gmail.com](mailto:fadhanhadi09@gmail.com), [kasmankarimi@bunghatta.ac.id](mailto:kasmankarimi@bunghatta.ac.id)

## ABSTRAK

*This study aims to examine the effect of the Anti-Corruption Behavior Index (IPAK), Public Expenditure, and Air Pollution on income inequality in Indonesia. Income inequality is a crucial issue in economic development because it hampers equitable distribution of growth and overall welfare. The dependent variable in this research is income inequality measured by the Gini ratio, while the independent variables consist of IPAK, Public Expenditure, and Air Pollution. The study uses panel data from 34 provinces in Indonesia during the 2020–2024 period. The analytical method employed is panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) as the best model, selected based on several model specification tests. Classical assumption testing and hypothesis testing, both partially and simultaneously, were also conducted to identify the impact of independent variables on the dependent variable. The results reveal that IPAK has a positive and significant effect on income inequality, indicating that improvements in anti-corruption behavior are accompanied by rising inequality in certain regions. Public Expenditure shows a negative and significant effect, meaning that an increase in government spending can reduce income inequality. Meanwhile, Air Pollution has a positive but insignificant effect, suggesting that higher levels of pollution tend to widen inequality, although the impact is not statistically strong. Overall, this study highlights the importance of strengthening anti-corruption practices, ensuring well-targeted public spending, and implementing sustainable environmental policies to mitigate income inequality in Indonesia.*

**Keywords:** *Income Inequality, Anti-Corruption Behavior Index, Public Expenditure, Air Pollution, Panel Data.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn

Puji syukur saya panjatkan ke hadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga saya (penulis) dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Pengaruh Indeks Perilaku Anti Korupsi, Biaya Publik, dan Polusi Udara Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*”. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Universitas Bung Hatta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Dimulai dari tahap pengumpulan referensi, pemahaman teori, pengolahan data, hingga penarikan kesimpulan akhir. Setiap tahapan tentu tidak selalu berjalan lancar, banyak hambatan yang muncul baik dari keterbatasan pengetahuan, ketersediaan data, maupun kesulitan teknis. Namun, berkat doa, semangat, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui semua kendala tersebut hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Supardi Almarhum Ayahanda tercinta, yang meskipun telah tiada, doa, kasih sayang, dan teladan hidupnya senantiasa menjadi sumber kekuatan serta motivasi terbesar bagi penulis. Semoga Allah SWT melapangkan kuburnya, mengampuni segala dosa, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya.

dan Ibunda Dahliarti, yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral, dan semangat yang luar biasa kepada penulis. Segala pengorbanan dan ketulusan beliau menjadi cahaya dalam setiap langkah penulis hingga saat ini. Terima kasih kedua orang tua tercinta yang telah merawat, mendidik, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan putranya agar dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Terima kasih telah memberikan dukungan materil maupun non materil kepada saya hingga saat ini. Semoga saya bisa membuat bapak dan ibu bangga.

2. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada adik tercinta, Suhaimah Zahra, yang meskipun masih kecil, selalu menjadi sumber keceriaan dan penghibur di tengah proses panjang penyusunan skripsi ini. Senyum polos, canda, serta kehadirannya memberikan semangat baru bagi penulis setiap kali merasa lelah dan jenuh. Kehadirannya tidak hanya membawa kebahagiaan dalam keluarga, tetapi juga menjadi pengingat bagi penulis untuk terus berusaha dan memberikan teladan yang baik demi masa depan yang lebih baik.
3. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Erni Febrina Harahap, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Nurul Huda, S.E.,M.Si selaku Kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
6. Bapak Dr. Kasman Karimi, S.E ,M.Si selaku dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

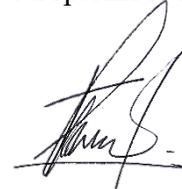
7. Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta atas segala bantuan dan arahannya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Dosen Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
9. Teman – teman Angkatan 21 Prodi Ekonomi Pembangunan, terutama bagi teman sepebimbingan ada Azhari, Gun Algazali, Yang Yang, Khayudha yang telah bersama – sama melalui banyak ujian selama skripsi ini dibuat. Dan juga teman – teman yang dikontrakan ada Rahul Guskar, Akmal Yusuf, Gema Alfitriah, Aulia Ahmad, Reyhan, Rogel, Habib yang sama – sama belajar dan berbagi pengetahuan selama skripsi ini dibuat.
10. Teman – teman kelas ada Yophi, Cintia, Tiara, Dearlin, Selvia, Niken, Nathasya, Lathifa, dan Eva Nelsia yang sudah berbagi ilmu pengetahuan selama 2 tahun saya menggali pendidikan di Universitas Bung Hatta .
11. Sri Waila Marcelly yang selalu ada menemani dan memotivasi baik secara moral dan batin penulis selama skripsi ini dibuat.
12. Teman – teman kosan yang menjadi keluarga kedua, yang memberikan kebersamaan, dukungan, dan keceriaan selama menjalani perkuliahan.
13. Teman – teman KKN yang sudah memberikan kebersamaan dan pengalaman penting dalam kegiatan lapangan.
14. Dan sahabat – sahabat di kampung halaman yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dari jauh maupun dekat.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang nyata, baik sebagai tambahan literatur dalam bidang ekonomi pembangunan maupun sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia. Semoga karya ini dapat berguna bagi pembaca serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan.

Padang, 04 September 2025



Fadhan Hadi

(2310011111014)

## DAFTAR ISI

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....   | Error! Bookmark not defined. |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....  | <b>iii</b>                   |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>iv</b>                    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>vi</b>                    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>x</b>                     |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | <b>xiii</b>                  |
| <b>DAFTAR GRAFIK</b> .....  | <b>xiv</b>                   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>                     |
| 1.1    Latar Belakang .....   | 1                            |
| 1.2    Rumusan Masalah .....  | 10                           |
| 1.3    Tujuan Penelitian.....   | 11                           |
| 1.4    Manfaat Penelitian .....   | 11                           |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS</b> .....                           | <b>13</b>                    |
| 2.1    Ketimpangan Pendapatan .....   | 13                           |
| 2.1.1    Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan.....                                    | 13                           |
| 2.1.2    Kurva Lorenz .....   | 14                           |
| 2.2    Korupsi .....  | 16                           |
| 2.2.1    Indeks Perilaku Anti Korupsi .....   | 17                           |
| 2.3    Biaya Publik .....   | 19                           |
| 2.3.1    Jenis-Jenis Biaya Publik.....  | 20                           |
| 2.4    Polusi Udara .....   | 22                           |
| 2.4.1    Dampak Polusi Udara Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....                       | 24                           |
| 2.5    Hubungan Variabel Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....                          | 26                           |
| 2.5.1    Hubungan Indeks Perilaku Anti Korupsi Terhadap Ketimpangan<br>Pendapatan ..... | 26                           |
| 2.5.2    Hubungan Biaya Publik Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....                     | 28                           |
| 2.5.3    Hubungan Pulusi Udara Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....                     | 29                           |
| 2.6    Penelitian Terdahulu.....  | 31                           |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| 2.7  | Kerangka Pemikiran.....  | 41        |
| 2.8  | Hipotesis Penelitian.....  | 41        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>     |  | <b>44</b> |
| 3.1  | Teknik Pengolahan Data .....   | 44        |
| 3.2  | Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....                       | 45        |
| 3.3  | Teknik Analisis Data .....   | 48        |
| 3.3.1                                      | Uji Asumsi Klasik.....   | 48        |
| 3.3.2                                      | Model Regresi Data Panel.....  | 49        |
| 3.3.3                                      | Uji Kesesuaian Model.....  | 52        |
| 3.3.4                                      | Pengujian Hipotesis.....   | 53        |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM VARIABEL .....</b> |  | <b>55</b> |
| 4.1  | Gambaran Umum Variabel Penelitian.....                                   | 55        |
| 4.1.1                                      | Ketimpangan Pendapatan.....  | 55        |
| 4.1.2                                      | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) .....                                | 57        |
| 4.1.3                                      | Biaya Publik (Belanja Pemerintah/Transfer ke Daerah dan Dana Desa) ..... | 59        |
| 4.1.4                                      | Polusi Udara.....  | 61        |
| <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>    |  | <b>64</b> |
| 5.1  | Pengujian Istrumen Penelitian.....                                       | 64        |
| 5.2  | Analisis Regresi Panel .....   | 64        |
| 5.3  | Uji Model Terbaik Regresi Data Panel .....                               | 67        |
| 5.3.1                                      | Uji Chow .....   | 67        |
| 5.3.2                                      | Uji Hausman .....  | 68        |
| 5.4  | Uji Asumsi Klasik .....  | 69        |
| 5.4.1                                      | Uji Multikolonieritas.....   | 69        |
| 5.4.2                                      | Uji Heteroskedastisitas.....   | 70        |
| 5.4.3                                      | Uji Autokorelasi .....   | 70        |
| 5.4.4                                      | Uji Normalitas.....  | 71        |
| 5.5  | Uji Analisis Regresi .....   | 72        |
| 5.6  | Uji Hipotesis .....  | 74        |
| 5.6.1                                      | Uji t (Parsial).....   | 74        |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 5.6.2                                   | Uji f (Simultan) .....  | 75        |
| 5.6.3                                   | Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....   | 76        |
| 5.7                                     | Pembahasan.....   | 76        |
| 5.7.1                                   | Pengaruh Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Terhadap Ketimpangan Pendapatan..... | 77        |
| 5.7.2                                   | Pengaruh Biaya Publik Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....                       | 78        |
| 5.7.3                                   | Pengaruh Polusi Udara Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....                       | 78        |
| 5.8                                     | Hasil Uji Konsistensi Teori .....   | 79        |
| <b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b> |   | <b>81</b> |
| 6.1                                     | Kesimpulan.....   | 81        |
| 6.2                                     | Saran.....  | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>              |   | <b>84</b> |
| LAMPIRAN 1: TABULASI PENELITIAN .....   |   | 89        |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 4. 1 Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2020 – 2024 .....   | 56 |
| Tabel 4. 2 Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2020 – 2024 .....  | 58 |
| Tabel 4. 3 Jumlah Belanja Pemerintah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa menurut Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2024 (Dalam Miliar Rupiah)..... | 60 |
| Tabel 4. 4 Indeks Kualitas Udara (IKU) tiap Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2024 Indikator (PM10).....  | 62 |
| Tabel 5. 1 Hasil Uji Regresi Panel Dengan Common Effect Model.....   | 65 |
| Tabel 5. 2 Hasil Uji Regresi Panel Dengan Fixed Effect Model.....  | 66 |
| Tabel 5. 3 Hasil Uji Regresi Panel dengan Random Effect Model .....  | 67 |
| Tabel 5. 4 Hasil Uji Chow .....  | 68 |
| Tabel 5. 5 Hasil Uji Hausman .....   | 68 |
| Tabel 5. 6 Hasil Uji Multikolonieritas.....  | 69 |
| Tabel 5. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....   | 78 |
| Tabel 5. 8 Hasil Uji Autokorelasi.....   | 79 |
| Tabel 5. 9 Uji Normalitas .....  | 80 |
| Tabel 5. 10 Hasil Uji Analisis Regresi .....   | 81 |
| Tabel 5. 11 Hasil Uji t .....  | 83 |
| Tabel 5. 12 Hasil Uji f.....   | 84 |
| Tabel 5. 13 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....   | 76 |

## DAFTAR GRAFIK

|   |   |
|---|---|
| Grafik 1. 1 Data Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) tiap Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024 .....   | 2 |
| Grafik 1. 2 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tiap Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2024.....   | 4 |
| Grafik 1. 3 Jumlah Belanja Pemerintah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa menurut Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2024 (Dalam Miliar Rupiah)..... | 6 |
| Grafik 1. 4 Indeks Kualitas Udara (IKU) tiap Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2024 Indikator (PM10).....  | 8 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi dijadikan sebagai indikator utama bagi negara yang sedang berkembang. Pembangunan ekonomi secara sederhana bisa diartikan sebagai proses usaha dalam melaksanakan transformasi menuju arah yang semakin lebih baik dibandingkan sebelumnya sekaligus memajukan taraf hidup menjadi lebih baik, agar ketentraman dan juga kemakmuran mampu meningkat. Pembangunan bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Keadilan dan kesejahteraan akan tercapai jika terjadi pemerataan pada pembangunan. Tetapi yang terjadi dalam proses pembangunan adalah ketimpangan pembangunan dan ketimpangan pendapatan ekonomi antar wilayah.

Adanya ketimpangan pendapatan ekonomi yang besar antar wilayah akan membawa dampak negatif dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Ketimpangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal yang tidak sebagaimana mestinya seperti tidak adil atau tidak beres. Ketimpangan pendapatan adalah sesuatu pemerataan pendapatan pada suatu wilayah yang tidak sebagaimana mestinya (Rambay Judan Mara, 2018). Ketimpangan pendapatan menunjukkan sejauh mana kesejahteraan atau kemakmuran suatu wilayah. Namun, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang pesat harus menyelesaikan permasalahan – permasalahan ekonomi seperti korupsi, biaya publik yang tidak tepat sasaran dan faktor polusi udara yang bisa membuat ketimpangan pendapatan pada masyarakat menyebabkan pembangunan

ekonomi terus terhambat. Ini merupakan masalah ekonomi yang terus terjadi di Indonesia dimulai dari ketimpangan pendapatan yang menunjukkan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat, dimana sebagian kecil penduduk menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi, sementara sebagian besar lainnya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar atau pokok mereka. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat dilihat dari angka *Gini Ratio*. Berikut grafik data ketimpangan pendapatan tiap provinsi di Indonesia dari tahun 2020 – 2024.

**Grafik 1. 1**  
**Data Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) tiap Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024**



Sumber: *BPS.GO.ID*

Ketimpangan pendapatan di Indonesia dari tahun 2020 – 2024 mengalami tren fluktuatif, dengan kecenderungan menurun secara bertahap sebelum pandemi

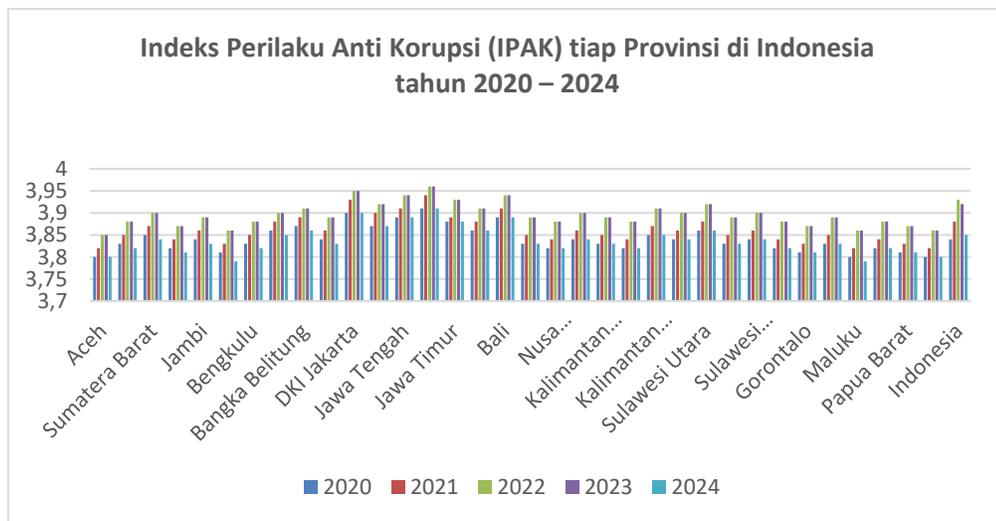
COVID-19 dan mengalami sedikit kenaikan setelahnya. Selama COVID-19 pada 2020 – 2021, ketimpangan relatif stabil di kisaran 0,381 – 0,384 karena adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi Listrik, dan program prakerja yang membantu mempertahankan daya beli masyarakat. Pada tahun 2022, angka ini meningkat menjadi 0,388, yang menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2024 naik lagi ke 0,381, kemungkinan akibat inflasi dan perlambatan ekonomi global.

Salah satu faktor yang berkontribusi besar terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah korupsi. Tindakan korupsi terbukti memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia baik pada aspek ekonomi maupun norma dan budaya masyarakat. Sampai saat ini korupsi merupakan masalah kronis yang umum dideritakan oleh negara-negara maju dan berkembang di seluruh dunia. Semua negara berusaha untuk memberantas korupsi dengan menerapkan langkah-langkah legislatif dan membentuk lembaga anti korupsi sebagai badan pelaksana. Indonesia sebagai salah satu negara dengan peringkat korupsi tertinggi, memiliki lembaga anti korupsi yang di kenal dengan istilah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di bentuk pada tahun 2002.

Korupsi yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan dan swasta menyebabkan alokasi umum dan sumber daya menjadi tidak efisien, menghambat investasi, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah negara. Dan juga korupsi dapat memperburuk ketimpangan pendapatan kerana sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat telah disalah gunakan oleh oknum-oknum yang memiliki akses kekuasaan. Dampak korupsi begitu besar sudah menjadi

tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali, dan menjadi tanggung jawab masyarakat juga untuk turut serta bersama pemerintah memerangi korupsi. Karena sangat merugikan negara yang menyebabkan penurunan kualitas dan ketimpangan pendapatan manusia secara luas (Putra & Linda, 2022). Berikut adalah data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tiap Provinsi di Indonesia tahun 2020 - 2024.

**Grafik 1. 2**  
**Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tiap Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2024**



Sumber : BPS.GO.ID

Data IPAK Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Setelah mengalami peningkatan dari 3,84 pada tahun 2020 menjadi 3,93 pada tahun 2022, nilai IPAK menurun menjadi 3,92 pada tahun 2023 dan Kembali turun menjadi 3,85 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa masyarakat menjadi lebih permisif terhadap perilaku korupsi. Pada tahun 2024, nilai IPAK sebesar 3,85 turun dari 3,92 pada tahun sebelumnya.

Mengingat dampak buruk korupsi, diperlukan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan ini melalui kerjasama yang terintegrasi antara penegak hukum dan dukungan masyarakat, karena sanksi pidana saja tidak cukup untuk mengurangi jumlah kasus korupsi. Partisipasi masyarakat disini berperan untuk upaya *preventif* dalam mengatasi masalah ini. Masyarakat dipandang sebagai komponen negara, masyarakat berperan dalam mendukung arahan pemerintah untuk memberantas kejahatan ini. Negara mengandung tiga pihak utama yaitu pemerintahan, masyarakat, dan swasta yang harus berkolaborasi dalam tujuan untuk memberantas korupsi (Putra & Linda, 2022).

Selain korupsi, biaya publik yang tinggi juga dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Biaya publik yang mencakup pengeluaran pemerintah untuk Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan sosial seharusnya menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun bila pengelolaan biaya publik tidak optimal atau disalah gunakan, masyarakat miskin tentu akan sulit untuk mengakses layanan dasar, yang berujung memperlebar jurang ketimpangan pendapatan di Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, pada prinsipnya ialah penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Sehingga ada keseimbangan antara kewenangan atau urusan dan tanggung jawab yang diserahkan kepada daerah dengan sumber pendanaanya. Selain itu biaya publik juga diharapkan dapat mengatasi ketimpangan daerah di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan skema bantuan transfer kepada daerah dalam bentuk dana perimbangan pusat daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bertujuan untuk

mengatasi masalah kesenjangan antar daerah (ketimpangan pendapatan) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam untuk mengatasi masalah ketimpangan antara pusat daerah serta Dana Alokasi Khusus (DAK) (Aswar & Primta Surbakti, 2013). Berikut ini grafik Anggaran Belanja Negara (APBN) belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer tiap Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2024.

**Grafik 1.3**  
**Jumlah Belanja Pemerintah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa menurut Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2024 (Dalam Miliar Rupiah)**



Sumber : BPS.GO.ID (diolah peneliti)

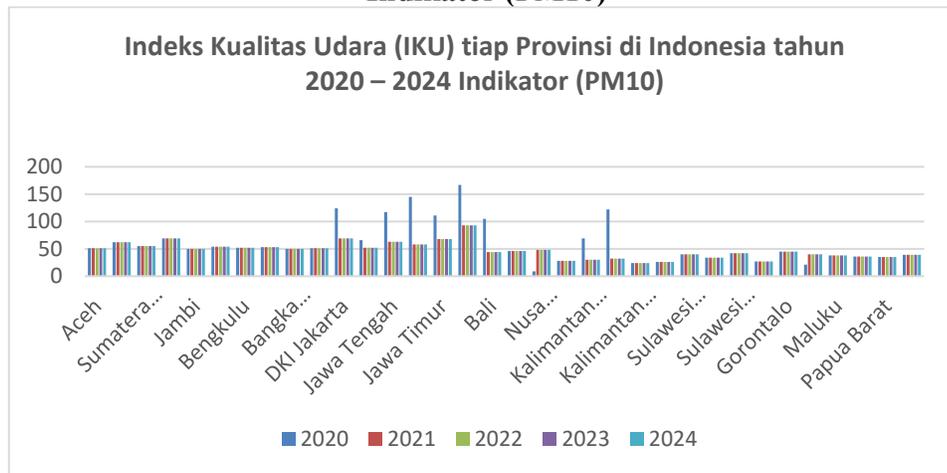
Data Anggaran Belanja Negara (APBN) dari biaya operasi, biaya modal, biaya tidak terduga dan biaya transfer di atas, setiap tahunnya mengalami kenaikan terutama di provinsi DKI Jakarta dengan biaya anggaran terbesar di tahun 2024 mencapai 345 miliar menjadi lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu 339 miliar. Adapun provinsi yang paling sedikit mendapatkan anggaran di tahun 2024 adalah Sulawesi Barat yaitu 92 miliar, anggaran yang relatif kecil ini mungkin disebabkan faktor geografis, jumlah penduduk, atau tingkat pembangunan.

Di Indonesia ada daerah dengan kekayaan alam yang melimpah, ada juga daerah yang tidak memiliki kekayaan alam yang besar namun dikarenakan struktur perekonomian yang telah tertata dengan baik maka potensi pajak dapat dioptimalkan sehingga daerah tersebut menjadi maju. Tapi masih banyak daerah yang secara struktur masih tertinggal. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu mekanisme atau sistem dalam mengatur perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah guna membiayai tugas yang diberikan kepada pemerintah daerah. Mekanisme yang digunakan adalah pemerintah pusat memberikan dana transfer berupa hasil pajak bagi hasil non pajak (sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana transfer ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah (Aswar & Primta Surbakti, 2013).

Faktor lain yang turut memperburuk ketimpangan pendapatan adalah polusi udara. Polusi udara tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan biaya hidup, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang lebih rentan terdampak pada lingkungan. Masyarakat miskin cenderung tinggal di daerah dengan tingkat polusi yang lebih tinggi dan memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Hal ini membuat kondisi mereka memburuk dan memperbesar kesenjangan pendapatan. Karena itu, hampir semua kegiatan manusia mempengaruhi pencemaran ke dalam atmosfer. Dampak dari pencemaran kegiatan manusia tidak akan mempengaruhi terhadap alam saja, akan tetapi akan berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan seperti penurunan produktivitas pertanian, hewan, dan juga manusia seperti menyebabkan penyakit sehingga dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan.

Tingkat pencemaran udara yang tercapai menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia. Pencemaran lingkungan tersebut tidak dapat dihindari dan semakin hari terus meningkat (Megalina Yeni, 2015). Berikut adalah grafik Indeks Kualitas Udara (IKU) tiap Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2024.

**Grafik 1. 4**  
**Indeks Kualitas Udara (IKU) tiap Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2024**  
**Indikator (PM10)**



Sumber : BPS.GO.ID

Grafik indeks kualitas udara (IKU) menunjukkan dinamika yang menarik dalam pola polusi udara di Indonesia selama periode 2020-2024. Secara umum, terjadi perbaikan kualitas udara yang signifikan di sebagian besar provinsi, terutama di wilayah Jawa-Bali, meskipun beberapa daerah masih menghadapi tantangan serius. Provinsi seperti DI Yogyakarta, Bali, dan Jawa Barat mengalami penurunan IKU yang drastis, menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan seperti pembatasan emisi kendaraan dan pengaturan industri. Namun, Banten tetap menjadi wilayah dengan udara terburuk (IKU 93) akibat konsentrasi industri berat dan aktivitas pelabuhan, sementara DKI Jakarta dan Riau juga masih berada di tingkat yang mengkhawatirkan karena faktor transportasi dan kebakaran lahan.

Di sisi lain, beberapa provinsi justru menunjukkan tren yang berlawanan. Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami penurunan kualitas udara paling tajam, dari IKU 9 (sangat baik) pada 2020 menjadi 48 (sedang) pada 2024, diduga karena meningkatnya aktivitas pertanian atau industri skala kecil. Sementara itu, wilayah seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan justru memiliki IKU terbaik (24-32), bertolak belakang dengan citra negatif deforestasi yang sering melekat pada kawasan tersebut.

Perubahan drastis juga terlihat pada beberapa kasus, seperti penurunan drastis IKU DKI Jakarta dari 124 (2020) ke 69 (2024) yang mungkin dipengaruhi perubahan kebijakan atau metodologi pengukuran. Begitu pula dengan Sulawesi Barat yang mengalami kenaikan IKU signifikan, diduga karena ekspansi aktivitas tambang. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian polusi udara di Indonesia mulai membuahkan hasil, meskipun disparitas antar daerah masih tinggi. Ke depan, fokus perlu diberikan pada wilayah dengan IKU tinggi seperti Banten dan Riau, sementara tren pencemaran di daerah seperti NTT perlu diteliti lebih lanjut untuk mengantisipasi potensi masalah lingkungan yang lebih serius.

Saat ini jumlah kendaraan yang tersedia semakin meningkat jumlahnya. Diperkotaan kontribusi gas pembuangan kendaraan bermotor sebagai sumber udara mencapai 60-70% sedangkan kontribusi polusi udara yang berbahaya bagi Kesehatan manusia, hewan, serta merusak harta benda adalah partikulat yang mengandung partikel (Megalina Yeni, 2015). Faktor yang menyebabkan dominannya pengaruh transportasi terhadap pencemaran udara, yaitu:

- Perkembangan jumlah kendaraan yang meningkat

- Tidak seimbangannya prasarana transportasi dengan jumlah kendaraan yang ada
- Pola lalu lintas perkotaan yang berorientasi memusat
- Masalah turunan akibat pelaksanaan kebijakan pengembangan kota yang ada
- Kesamaan waktu aliran lalu lintas
- Jenis, umur dan karakteristik kendaraan
- Jenis bahan bakar yang digunakan

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian mengenai dampak korupsi, biaya publik, dan polusi udara terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia menjadi sangat menarik dan penting untuk di bahas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi distribusi pendapatan di Indonesia. Dengan memahami hubungan faktor – faktor tersebut diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan utama:

1. Seberapa besar pengaruh indeks perilaku anti korupsi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

2. Seberapa besar biaya publik berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh polusi udara terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

Dengan menjawab pertanyaan- pertanyaan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan empiris yang dapat digunakan sebagai dasar dalam kebijakan ekonomi dan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh indeks perilaku anti korupsi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh biaya publik terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
3. Menilai dampak polusi udara terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Dengan tujuan-tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi akademis maupun praktis, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Menambah wawasan dan literatur akademik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan, khususnya faktor korupsi, biaya public, dan polusi udara. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap studi ekonomi pembangunan dan kebijakan public dengan pendekatan empiris yang lebih komprehensif.

## 2. Manfaat praktis

Bagi pemerintah penelitian ini dapat merekomendasikan kebijakan yang dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan, alokasi anggaran yang lebih efektif, dan kebijakan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Bagi masyarakat sendiri dapat meningkatkan kesadaran akan dampak korupsi, biaya publik, dan polusi udara terhadap ketimpangan pendapatan baik ekonomi dan sosial, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan kebijakan pemerintah.

Dengan manfaat penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.